BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat PT. PLN (Persero)

Sekitar abad ke–19 pada tahun 1897 mengatakan bahwa cahaya listrik mulai bersinar di wilayah Indonesia tepatnya di Batavia (Jakarta), setelah *Nederland Indische Electiriciteits Maatschappij* mendapatkan konsesi yang kemudian ditempatkan pada NIEM Tahun 1905.

Ketenagalistrikan dimulai pada akhir abad ke–19, pada zaman Pemerintahan Hindia–Belanda yaitu *NV. NIGM (Naamloze Vennootschap)* bidang gas Jakarta. Berdasarkan Staatsblad tahun 1927 No. 419 Pemerintah Hindia–Belanda membentuk *Lands Water Kracht Badrijven (LWKB)* yaitu Perusahaan Listrik Negara yang mengelola PLTA Lumajang, Plengan dan lain–lain, pembangunan listrik di wilayah Indonesia terjadi sebagai berikut:

a) Elektrifikasi di wilayah kota Batavia, sekitar tahun 1893 merupakan *Stads Bedriff* yang dikelola oleh pemerintah setempat dengan nama *Electricteit Bedriff Batavia.*

b) Elektrifikasi di wilayah kota Medan, sekitar tahun 1903 merupakan *Stads Bedriff* yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan nama *Electricteit Badriff Medan.*

c) Elektrifikasi di wilayah kota Surabaya, sekitar tahun 1907 merupakan *Stads Bedriff* yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan nama *Electricteit Badriff Surabaya.*

Pada tahun–tahun berikutnya bahwa kelistrikan antara lain dibangun di Palembang dalam kaitannya dengan usaha pertambangan minyak, sedangkan di Ambon dan Makasar untuk kepentingan Militer.

2.1.1 Perusahaan Listrik Zaman Hindia–Belanda

Setelah perusahaan listrik yang berpusat di Belanda didirikan di beberapa wilayah Indonesia, maka pendistribusian tenaga listrik oleh pemerintah daerah dialihkan kepada perusahaan listrik swasta. Menurut pencatatan pendirian perusahaan listrik Belanda yang ada di Indonesia terjadi, sebagai berikut:

1) Perusahaan Listrik *NV NIGM* yang kemudian berubah menjadi *NV OGEM.*
   a) Ijin beroperasi dikeluarkan melalui SK No. 28 tanggal 27 Juni 1913 mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah kota Batavia.
   b) Ijin beroperasi dikeluarkan melalui SK No. 29 tanggal 1 November 1915 mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah kota Messterconnelis (Jatinegara).
   c) Ijin beroperasi diberikan melalui SK No. 14 tanggal 17 Mei 1924 mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah kota Tangerang.

d) Ijin beroperasi dikeluarkan melalui SK No. 6 bulan November 1924 mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah kota Cirebon.

e) Ijin beroperasi dikeluarkan melalui SK No. 20 tanggal 25 November 1925 mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah kota Kebayoran Lama.

f) Ijin beroperasi dikeluarkan melalui SK No. 12 tanggal 16 Juni 1927 mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah kota Cirebon luar kota.

Pemberian ijin operasi kepada *NV NIGM* untuk luar jawa antara lain dikeluarkan untuk wilayah kota Medan dan kemudian secara berturut–turut menyusul diwilayah Palembang, Ujung Pandang, Tanjung Karang (Lampung) dan Manado. Keterangan mengenai ijin beroperasi kepada *NV. NIGM* untuk konsesi wilayah di luar jawa belum ditemukan, namun menurut berbagai pendapat dan keterangan yang diperoleh untuk wilayah Palembang terjadi sebelum tahun 1920 sedangkan untuk wilayah lainnya terjadi setelah tahun 1920, misalnya Medan, Lampung, Manado dan sebagainya.

2) Perusahaan Listrik *NV. ANEIM*

a) Ijin beroperasi dikeluarkan melalui SK No. 6 tanggal 8 Februari 1914 mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah Surabaya, Semarang dan Yogyakarta.

b) Ijin beroperasi dikeluarkan melalui SK No. 25 tanggal 9 Mei 1927 mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi beberapa wilayah di Jawa

Tengah dan Jawa Timur di luar wilayah yang telah dikelola oleh *OGEM, ELECTRICA, EMR* dan *EMB*.

c) Pemberian ijin kepada *NV. ANEIM* untuk elektrifikasi wilayah diluar Jawa antara lain Bukit Tinggi, Pontianak, Ambon dan sebagainya.

3) Perusahaan Listrik *NV GEBEO*

Perusahaan listrik ini merupakan usaha bersama Pemerintah Jawa Barat dengan keputusan yang diberikan sebagai berikut:

a) Ijin beroperasi dikeluarkan melalui SK No. 24 tanggal 30 Januari 1923/1928 mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah Bandung dan sekitarnya.

b) Ijin beroperasi dikeluarkan melalui SK No. 24 bulan Maret 1923/1928 mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah Bogor dan sekitarnya.

c) Ijin beroperasi dikeluarkan melalui SK No. 24 bulan Desember 1938; No. 17 tanggal 21 Desember 1938; No. 21 tanggal 20 Mei 1940 dan No. 30 tanggal 18 Januari 1940 mengenai pemberian konsesi untuk elektrifikasi wilayah keresidenan dan kabupaten seluruh Propinsi Jawa Barat, kecuali Cirebon dan Jakarta yang dikelola *NV. NIGM*

4) Perusahaan Listrik *ELECTRA*

a) Ijin beroperasi dikeluarkan kepada perusahaan listrik *ELECTRA* melalui SK No. 37 tanggal 7 Juni 1915 untuk elektrifikasi wilayah kota Tulung Agung.

b) Ijin beroperasi dikeluarkan kepada perusahaan listrik *ELECTRA* melalui SK No. 31 tanggal 4 September 1922 dan SK No. 33 tanggal 30 Maret 1927 untuk elektrifikasi wilayah luar kota Tulung Agung.

5) Perusahaan listrik *SEM*

a) Ijin beroperasi dikeluarkan melalui SK No. 15 tanggal 21 Desember 1925 untuk elektrifikasi wilayah kota Kesultanan Surakarta.

b) Ijin beroperasi dikeluarkan melalui SK No. 8 tanggal 8 Januari 1937 untuk elektrifikasi wilayah kabupaten dan sekitarnya yang termasuk wilayah Surakarta.

6) Perusahaan Listrik *OJEM*

Ijin beroperasi melalui SK No. 28 tanggal 24 Februari 1925; No. 61 dan 62 tanggal 29 Agustus 1927 dan No. 16 tanggal 8 Juni 1929 untuk elektrifikasi wilayah Keresidenan Panarukan dan beberapa kabupaten disekitarnya.

7) Perusahaan Listrik *EMR*

a) Ijin beroperasi dikeluarkan melalui SK No. 12 tanggal 25 Juni 1927 untuk elektrifikasi wilayah kota Palembang.

b) Ijin beroperasi dikeluarkan melalui Sk. No. 8, 9 , 10, tanggal 4 Maret 1929 untuk elektrifikasi wilayah Blora dan Bojonegoro.

8) Perusahaan Listrik *EMB*

Ijin beroperasi dikeluarkan melalui SK. No. 31 tanggal 27 September 1939 untuk elektrifikasi wilayah Keresidenan Banyumas.

2.1.2 Perusahaan Listrik Zaman Jepang

Dalam Perang Dunia II semua perusahaan listrik di wilayah Indonesia secara otomatis berada dibawah kekuasaan tentara Jepang. Perusahaan Listrik yang berada dibawah kekuasaan dan pengawasan Angkatan Darat Jepang dijadikan perusahaan listrik Jepang dengan nama sebagai berikut:

1) *Jawa Denki Jigyoko Sha* di kantor pusat Jakarta
2) *Seibu Jawa Denki Sha* di wilayah Jawa Barat
3) *Chobu Jawa Denki Sha* di wilayah Jawa Tengah
4) *Tobu Jawa Denki Sha* di wilayah Jawa Timur
5) Cabang–cabang lainnya tetap seperti semula

Dengan penguasaan tersebut, pimpinan perusahaan juga dipegang oleh tenaga yang didatangkan dari Jepang.

2.1.3 Masa Agresi I Belanda

Pada tahun 1948, Belanda masuk ke Indonesia maka pemerintahan Republik Indonesia hijrah ke Yogyakarta sehingga pengusahaan dan distribusi tenaga listrik khususnya di Jawa Barat termasuk Jakarta diusahakan kembali oleh GEBEO NV, sedangkan usaha pembangkitan dan penyalurannya tetap dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia yaitu oleh Perusahaan/negara untuk Pembangkitan Tenaga Listrik yang disingkat PENUPTEL, dengan wilayah kerja meliputi seluruh Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Pada tanggal 27 Desember 1957, dalam rangka pembebasan Irian Barat, GEBEO NV sebagai perusahaan milik asing diambil alih oleh perusahaan karyawan yang berkewarganegaraan Indonesia. Akhirnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1958 tentang Perusahaan Negara, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah diatas ditetapkan bahwa Perusahaan Belanda yang ada di Indonesia berada dibawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia.

Dengan jalan nasionalisasi, perusahaan milik negara tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar–besarnya untuk masyarakat Indonesia dan juga untuk memperkokoh keamanan dan ketahanan negara Republik Indonesia. Dengan UU No. 86 tahun 1958, tanggal 27 Desember tahun 1958 disahkan perusahaan milik Belanda, dan salah satunya GEBEO NV.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1960, GEBEO NV dihapuskan dan namanya diganti menjadi Perusahaan Listrik Negara (PLN) Bandung yang mempunyai wilayah kerja diseluruh Jawa Barat kecuali DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang.

Pada tahun 1961, semua perusahaan listrik Indonesia disatukan kedalam suatu badan yang bernama Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Nasional (BPU–PLN). Sebagai wadah kesatuan pimpinan PLN berdasarkan PP No. 67 tahun 1961, tugasnya adalah untuk mendistribusikan tenaga listrik di Indonesia dan tenaga pembangkitnya dipegang oleh PLN Pusat di Jakarta.

Dengan PP No. 19 tahun 1965, dibentuklah Perusahaan Listrik Negara yang bernaung dibawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. I / PRT / 1965 tanggal 21 Januari 1965 diadakan reorganisasi PLN dimana BPU–L dihapus dan ditingkat daerah dibentuk susunan organisasi PLN yang disebut Perusahaan Listrik Eksplorasi dimana untuk Jawa Barat disebut PLN Eksploring XI, yang berkedudukan di Bandung yang mempunyai wilayah kerja di Jawa Barat kecuali Tangerang, Jakarta, Bogor, Sukabumi, dan Banten.

2.1.4 Perusahaan Listrik Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI

Perang Dunia diakhiri pernyataan menyerahnya Jepang pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 dengan begitu maka tentara sekutu akan memasuki dan menduduki wilayah Indonesia tetapi pimpinan Indonesia telah mendahului memproklamasikan kemerdekaannya menjadi Negara Republik Indonesia. Pengambilalihan pemimpinan perusahaan listrik pertama dilakukan terjadi pada tanggal 4 September1945 dipusat (Djawa Denki Jigyokoska) Jakarta oleh Kesatuan aksi Karyawan Listrik . Pada 19 September 1945 dalam hari berikutnya pengambilalihan meluas ke daerah lainya seperti di Surabaya, Semarang, Bandung, dan Yogyakarta. Pada tanggal 27 Oktober 1945 dengan PP No. I SD / 45 merupakan hari dan tanggal yang bersejarah bagi Perusahaan Listrik era tahun 1945 karena pada hari itu adalah hari jadi Listriik.

Perkembangan selanjutnya ialah dikeluarkannya PP No. 18 tahun 1972 tentang pembentukan Perusahaan Umum Listrik Negara yang berkantor di Jakarta.

Dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) No. 043 / PMS 1975 tanggal 9 September 1975 tentang organisasi dan tata kerja Perusahaan Listrik Negara, maka PLN mengadakan reorganisasi yang menyangkut tugas dan wilayah kerja di daerah, kemudian berdasarkan pengumuman No.05 / DIII / Sek / 1975, maka Perusahaan Listrik Negara Eksploitasi XI diganti namanya menjadi Perusahaan Listrik Negara Distribusi III yang diberi tugas khusus untuk melaksanakan atau mengusahakan distribusi tenaga listrik langsung kepada para pemakai.

Berdasarkan PP No. 18 tahun 1976, PLN Distribusi Jawa Barat yang berkantor di jalan Cikapundung Barat No. II tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1970 ditegaskan statusnya menjadi suatu Perusahaan Umum (PERUM), sebagaimana termaksud dalam pasal 2 ayat 2 UU No. 9 tahun 1969 dengan nama Perusahaan Listrik Negara.

Saat ini PLN Distribusi Jawa Barat mempunyai 15 cabang, 1 bengkel, 1 untuk pengaturan distribusi, dan 1 kantor distribusi yang terdaftar sebagai berikut:

1) Cabang Cirebon
2) Cabang Tasikmalaya
3) Cabang Garut
4) Cabang Cianjur
5) Cabang Sukabumi
6) Cabang Bogor
7) Cabang Banten

8) Cabang Purwakarta

9) Cabang Cimahi

10) Cabang Bandung

11) Cabang Majalaya

12) Cabang Bekasi

13) Cabang Depok

14) Cabang Sumedang

15) Cabang Karawang

16) Unit Pengatur Distribusi

17) Kantor Distribusi

Dalam penjelasan dan pengumuman tentang Kabinet Pembangunan (29 Maret 1978), Perusahaan Umum Listrik Negara (PULN) semula bernaung dibawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, dialihkan kedalam naungan Departemen Pertambangan dan Energi.

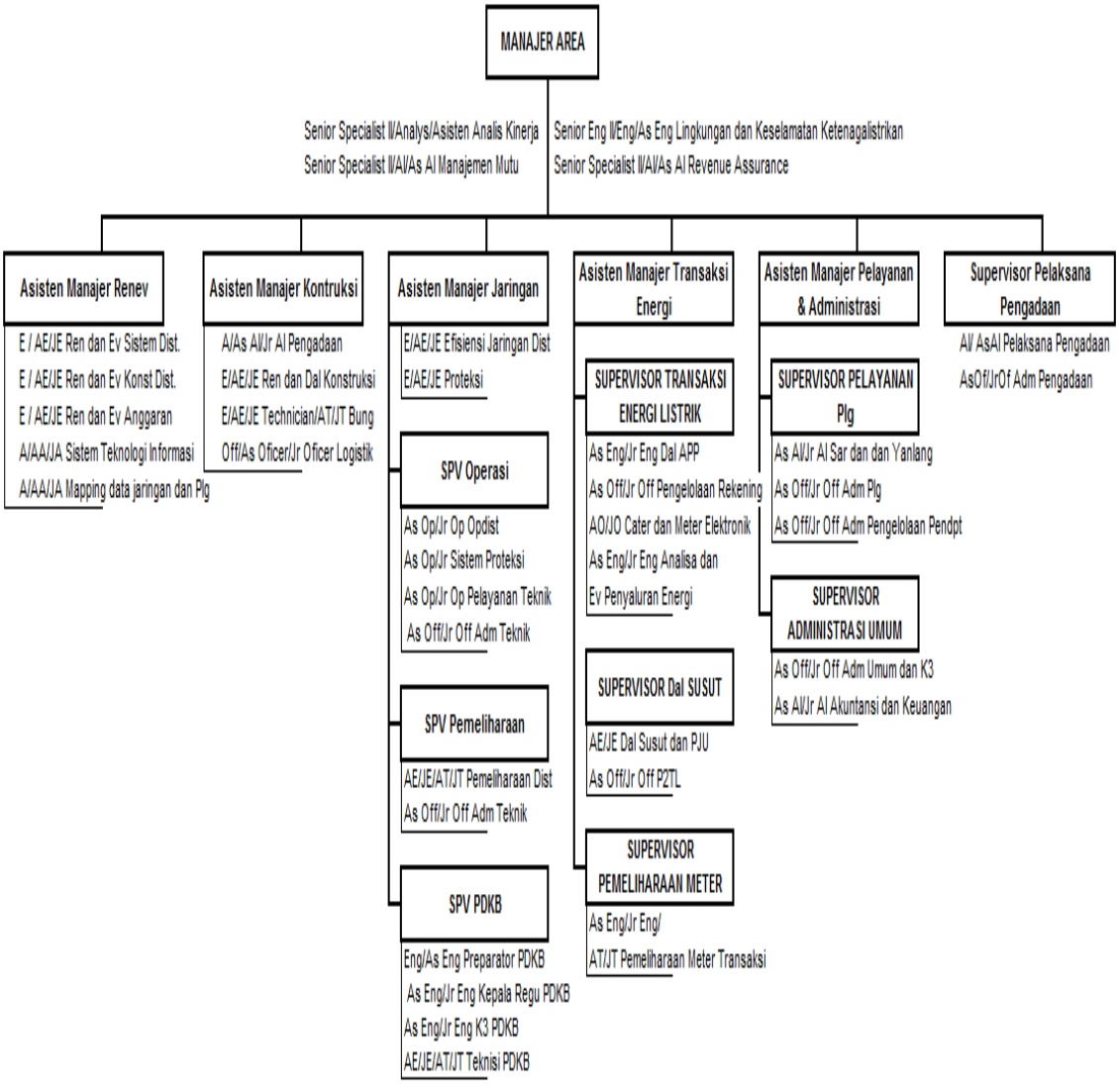
Dalam sejarah perkembangannya, PULN dibawah naungan Departemen Pembangunan dan Energi mengalami perubahan status dari Perusahaan Umum Negara (PUN) menjadi PT. PLN (Persero), dengan diterbitkannya PP No. 23 tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi Perusahaan Terbatas (Persero) yang termuat dalam lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1994 No. 34 sehingga Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Barat berubah namanya menjadi P LN (Persero) Distribusi Jawa Barat.

2.2 Struktur Organisasi

PLN mempunyai struktur organisasi yang sistematis dan terorganisir, sejak berdirinya PLN sampai sekarang tidak mengalami perubahan struktur, hanya saja tugas dan fungsinya mengalami perubahan, karena hal ini memang harus disesuaikan dengan kondisi dan cakupan wilayah kerja dalam bidangnya.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Bandung.



2.3 Uraian Tugas Perusahaan

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Cabang Bandung dipimpin oleh Kepala Cabang yang dibantu oleh tiga orang kepala bagian, yaitu:

1) Asisten Manager Niaga
2) Asisten Manager Perencanaan dan Distribusi
3) Asisten Manager SDM dan Keuangan

Selain itu ada bagian fungsional ahli yang berfungsi sebagai penasehat kepala cabanng untuk membantu memberikan saran dalam mengambil keputusan untuk kegiatan kelancaran usaha. Untuk lebih jelasnya dibawah ini diuraikan tugasnya masing–masing:

1) Asisten Manajer Niaga, bertugas:
    a) Menyusun rencana kerja Bagian Pelayanan Pelanggan sebagai pedoman kerja.
    b) Memberi petunjuk kepada Kepala Seksi di Bagian Pelayanan Pelanggan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
    c) Mengkoordinir pelaksanaan pemasaran, tata usaha langganan, penyambungan dan pengolahan data guna kelancaran pelaksanaannya.
    d) Mengkaji laporan–laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada pelanggan untuk mengetahui hambatan–hambatan dan usaha penyelesaiannya.
    e) Mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan kepada pelanggan sesuai dengan ketentuan.

f) Memgevaluasi data statistik yang berkaitan dengan perkembangan daerah setempat untuk penetapan rencana penjualan.

g) Menyusun RAO/UAI Bagian Pelayanan Pelanggan secara berkala.

h) Membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya.

i) Melaksanakan tugas–tugas kedinasan lain yang sesuai dengan kewajiban dan tangung jawab pokoknya.

- SPV.Sistem informasi, bertugas:
  - Menyusun rencana kerja Seksi Pengolahan Data sesuai rencana kerja Bagian sebagai pedoman kerja.
  - Membagi tugas kepada bawahan di Seksi Pengolahan Data dalam rangka pelaksanaan tugas.
  - Melayani proses pengolahan data dari bagian – bagian lain, dengan aplikasi program yang sudah ada.
  - Mengevaluasi sistem informasi yang ada untuk modifikasi sesuai kebutuhan.
  - Mengawasi pengoperasian computer dilingkungan Seksi Pengolahan Data untuk keandalan pelayanan.
  - Memeriksa hasil pengolahan data untuk bahan evaluasi pengembangannya.
  - Mengawasi pengolahan data untuk pembuatan rekening guna ketepatan jadwal pelaksanaannya.

- Melaksanakan koordinasi dengan Seksi terkait guna kelancaran pengolahan data.

- SPV. Administrasi Niaga, bertugas:
  - Menyusun rencana kerja Seksi Administrasi Pelanggan sesuai rencana kerja bagian sebagai pedoman kerja.
  - Membagi tugas kepada bawahan di Seksi Administrasi Pelanggan dalam rangka pelaksanaan tugas.
  - Mengawasi dan mengkoordinir kegiatan pelayanan pelanggan yang ada di kantor Cabang atau kantor Ranting/Rayon.
  - Memeriksa berkas–berkas permohonan penyambungan dan penambahan daya untuk proses lanjutannya.
  - Melakukan pemeriksaan sampling, hasil pembacaan meter yang dilaksanakan Ranting atau Rayon.
  - Memonitor keluhan pelanggan yang diterima untuk upaya penyelesaiannnya.
  - Memeriksa SP, KPK, Kwitansi, BP/UJI, untuk kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.
  - Menghitung tagihan susulan OPAL sesuai ketentuan yang berlaku.
- SPV. SIstem Pelayanan Pelanggan, bertugas:
  - Menyusun langkah kegiatan pelayanan pelanggan sebagai pedoman kerja.

- Membuat jadwal kegiatan pelayanan pelanggan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- Memberikan informasi kepada pelanggan/calon pelanggan tentang prosedur penyambungan atau perubahan daya aliran listrik, pemakaian listrik sesuai ketentuan yang berlaku.
- Melayani permintaan pelanggan/calon pelanggan terhadap sambungan baru, perubahan daya/golongan tarif, balik nama/alamat, permintaan perbaikan dan menerima pengaduan langganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menyelesaikan mengenai perhitungan tagihan susulan berkaitan dengan hasil OPAL sebagai tindak lanjut dari seksi terkait.
- Menginformasikan kepada juru pencatat meter tentang adanya langganan baru/mutasi langganan dan dapat ditindak lanjuti oleh juru pendapat meter sesuai ketentuan yang berlaku.
- Membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya.
- Melaksanakan tugas–tugas lainnya sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab pokoknya.

2) Asisten Manajer Perencanaan dan Distribusi, bertugas:

a) Menyusun rencana kerja seksi perencanaan distribusi sebagai pedoman kerja.

b) Membagi tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.

c) Memeriksa dan menyusun SOP pemeliharaan jaringan distribusi agar target dan sasaran yang telah ditetapkan tercapai selama kurun waktu tertentu.

d) Memeriksa gambar diagram jaringan operasi yang telah disusun oleh bawahannya.

e) Memantau kondisi jaringan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan jaringan distribusi.

f) Memeriksa hasil RAO/UAI yang disampaikan oleh fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan jaringan distribusi sebagai bahan acuan ke kantor induk.

g) Memantau pelaksanaan pemutakhiran data/informasi jaringan distribusi.

h) Membuat laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya.

i) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab pokoknya.

3) Asisten Manajer SDM dan Keuangan, bertugas:

Untuk melaksanakan administrasi perusahaan secara keseluruhan sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan mencakup bidang–bidang kepegawaian, anggaran dan keuangan, akuntansi perbekalan, secretariat umum, serta bidang PUKK, dengan menggunakan metode serta data–data yang akurat untuk kemudian dibuat suatu laporan sesuai dengan bidangnya masing–masing. Adapun yang menangani kegiatan perbekalan yang ada di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Cabang Bandung dikelola oleh Seksi Perbekalan yang dimana pelaksanaan perbekalan tersebut

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi karena Seksi Perbekalan tersebut merupakan salah satu bagian dari Bagian Administrasi.

- SPV. Pengendalian Anggaran dan Keuangan, bertugas:
    - Menyusun rencana kerja Seksi Anggaran dan Keuangan sesuai rencana kerja Bagian sebagai pedoman kerja.
    - Membagi tugas kepada bawahan di Seksi Anggaran dan Keuangan dalam rangka pelaksanaan tugas.
    - Mengklasifikasikan data–data biaya dan pendapatan untuk memudahkan penyusunan anggaran.
    - Membandingkan realisasi anggaran dengan pos anggaran untuk bahan penyesuaian anggaran.
    - Menyusun RAO/UAI Cabang sesuai kebutuhan untuk pengusulan ke Wilayah/Distribusi.
    - Mengawasi penggunaan dana RAO/UAI yang telah disetujui agar tidak terjadi penyimpangan.
    - Membuat usulan revisi RAO/UAI sesuai kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan.
    - Memonitor penerimaan AT untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- SPV. Akuntansi, bertugas:
    - Menyusun rencana kerja Seksi Akuntansi sesuai rencana kerja Bagian sebagai pedoman kerja.

- Membagi tugas kepada bawahan di Seksi Akuntansi dalam rangka pelaksanaan tugas.
- Mengklasifikasikan data–data transaksi untuk pmbuatan kode perkiraan sesuai dengan fungsinya.
- Memeriksa pencantuman kode perkiraan pada masing–masing bukti pembayaran/penerimaan untuk kebenarannya.
- Memeriksa buku jurnal dan buku besar guna kecocokan pencatatannya.
- Memeriksa data realisasi pembayaran atas SKK, SPK, dan KPK untuk penilaian mutasi aktiva tetap dan PDP.

- Supervisor SDM, bertugas:
  - Menyusun rencana kerja Seksi Kepegawaian sesuai rencana kerja Bagian sebagai pedoman kerja.
  - Membagi tugas kepada bawahan di Seksi Kepegawaian dalam rangka pelaksanaan tugas.
  - Mengajukan usulan kebutuhan tenaga kerja PLN cabang berdasarkan perhitungan beban kerja dan formasi Jabatan.
  - Mengajukan usulan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan oleh pegawai sesuai dengan bidangnya.
  - Mengatur pelaksanaan tata usaha penggajian dan pengupahan pegawai serta kesejahteraan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Memeriksa dan mengatur pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan keselamatan kerja dan pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

- SPV. Asset dan Logistik, bertugas:

a) Menyusun rencana kerja Seksi Perbekalan dalam rangka pelaksanaan tugas.

b) Membagi tugas kepada bawahan di Seksi Perbekalan dalam rangka pelaksanaan tugas.

c) Membuat rencana persediaan barang dan peralatan perbekalan berdasarkan kebutuhan dan realisasi pemakaian sebelumnya.

d) Mempelajari dan mengikuti fluktuasi harga – harga satuan baik berdasarkan ketentuan PLN maupun harga di pasaran untuk bahan pedoman pengadaan.

e) Memeriksa administrasi perbekalan sesuai dengan keluar masuknya barang.

f) Memantau pengadaan barang serta administrasinya untuk mengetahui kesesuian antara realisasi dengan rencana.

g) Menentukan jumlah minimal barang yang harus tersedia di gudang berdasarkan pemakaian barang sebelumnya.

h) Membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya.

i) Melaksanakan tugas–tugas kedinasan lainnya sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab pokoknya.

2.4 Kegiatan Perusahaan

Kegiatan yang diadakan PT. PLN (Persero) APJ Bandung banyak melakukan kegiatan yang tergolong penyuluhan yaitu, sebagai berikut:

a) Penyuluhan kepada masyarakat, diadakan agar masyarakat dapat memahami manfaat dan bahaya listrik dalam pemakaian, serta untuk menampung semua masalah kelistrikan untuk mencari solusi yang disampaikan oleh masyarakat secara langsung. Pengadaan materi penyuluhan berupa tips atau peringatan dalam hal penggunaan listrik ,biasanya berbentuk pamflet, leaflet atau penyuluhan melalui radio (Radio Mora Bandung).

b) Pameran mengenai kelistrikan biasanya pameran Pembangunan, khususnya pembangunan mengenai kelistrikan.

c) Pemasaran (*Car Free Day*) Dago, Bandung.

d) POR (Pekan Olah Raga) PLN dengan PWI ini diartikan sebagai pertandingan persahabatan antara PLN dengan PWI agar terjalin hubungan yang akrab melalui penyaluran bakat atau hobi berolahraga.